

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Bekasi

Di dalam pembahasan ini, penulis memulai penelitian dengan mengenal terlebih dahulu lingkungan obyek penelitian dengan mengumpulkan data-data sejarah kabupaten Bekasi dan profil kecamatan-kecamatan yang menjadi kajian penulis sebagai bentuk representasi daerah yang bersinggungan secara langsung dalam dinamika politik pemekaran wilayah. Kecamatan-kecamatan yang menjadi kajian peneliti ialah Kecamatan Babelan yang menjadi target utama dalam penelitian ini dikarenakan di daerah ini terdapat sumber daya alam yang sangat baik serta kelompok yang berkepentingan langsung terhadap pemekaran khususnya dalam kepanitian pelaksanaan pemekaran. Selain Kecamatan Babelan, penulis juga mengkaji beberapa kecamatan yang lainnya yaitu kecamatan Muaragembong dan Kecamatan Sukatani yang nantinya direncanakan menjadi Ibu Kota Kabupaten Bekasi Utara.

Dalam catatan sejarah, nama “Bekasi” memiliki arti dan nilai sejarah yang khas. Menurut Poerbatjaraka, -seorang ahli bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno- Asal mula kata Bekasi, secara filosofis, berasal dari kata Chandrabhaga. Chandra berarti “bulan” (dalam bahasa Jawa Kuno, sama dengan kata Sasi) dan Bhaga berarti “bagian”. Jadi, secara etimologis kata Chandrabhaga berarti bagian dari bulan. Kata Chandrabhaga berubah menjadi Bhagasasi yang pengucapannya sering disingkat menjadi Bhagasi.

menjadi Bhagasasi yang pengucapannya sering disingkat menjadi Bhagasi. Kata Bhagasi ini dalam *pelafalan* bahasa Belanda seringkali ditulis “Bacassie” kemudian berubah menjadi Bekasi hingga kini. Selain secara arsip *kesejayang* dimiliki oleh Bekasi juga ada jejak arkeologi dari prasasti-prasasti yang ada, seperti : Prasasti Tugu, Ciaruteun, Muara Cianten, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi dan Prasasti Cidangiang.

Sejarah Bekasi tidaklah dapat dipisahkan dari kolonialisme Belanda, pada saat itu Bekasi merupakan salah satu distrik (*kawedanaan*) dari *Afdeeling/regenschap* Meester Cornelis, yaitu Residensi Batavia yang dibagi menjadi tiga *onderdistrik* yang didalamnya terdapat tuan-tuan tanah dan dibagi lagi dalam kesatuan administrasi terkecil yang disebut kampung. Akibat diterapkannya system penguasaan tanah secara partikelir, maka pada tahun 1869 terjadi pemberontakan petani Bekasi di Tambun. Pada tanggal 6 September berdiri Sarekat Islam Cabang Bekasi yang tujuannya ingin menyusun kekuatan untuk melawan tuan tanah.

B. Masa Terbentuknya Kabupaten Bekasi dan dinamika politik

Sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi dimulai dengan dibentuknya “Panitia Amanat Rakyat Bekasi” yang dipelopori R. Supardi, M. Hasibuan, KH. Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmains, yang menentang keberadaan RIS- Pasundan dan menuntut berdirinya kembali Negara Kesatuan RI. Selanjutnya diadakan Rapat Raksasa di Alun-alun Bekasi yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang rakyat Bekasi pada tanggal 17 Pebruari 1950. Menyampaikan tuntutan Rakyat Bekasi yang

berbunyi : satu: Penyerahan kekuasaan Pemerintah Federal kepada Republik Indonesia. dua: Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada Negara Republik Indonesia. tiga: Tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain Pemerintahan Republik Indonesia. empat: Menuntut kepada Pemerintah agar lama Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi. Upaya para pemimpin Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak terus dilakukan. Diantaranya mendekati para pemimpin Masjumi, tokoh militer (Mayor Lukas Kustaryo dan Moh. Moefreini Mukmin) di Jakarta. Pengajuan usul dilakukan tiga kali antarambulan Februari sampai dengan bulan Juni 1950 hingga akhirnya setelah dibicarakan dengan DPR RIS, dan Mohammad Hatta menyetujuiim penggantian nama “Kabupaten Jatinegara” menjadi “Kabupaten Bekasi“. Persetujuan pembentukan Kabupaten Bekasi semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950. Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bekasi. Selanjutnya pada tanggal 2 April 1960 Pusat Pemda Bekasi semula dipusatkan di Jatinegara (sekarang Markas Kodim 0505 Jayakarta, Jakarta) dipindahkan ke gedung baru Mustika Pura Kantor Pemda Bekasi yang terletak di Bekasi Kaum Jl. Jr. H. Juanda. Adapun daerah Hukum Kabupaten Jatinegara yang selanjutnya menjadi Kabupaten Bekasi, yaitu :

1. Kewedanaan Bekasi, meliputi :
 - a. Kecamatan Bekasi terdiri atas 9 desa.
 - b. Kecamatan Babelan terdiri atas 6 desa.
 - c. Kecamatan Cilincing terdiri atas 3 desa.
 - d. Kecamatan Pondok Gede terdiri atas 7 desa.
2. Kewedanaan Tambun, meliputi :
 - a. Kecamatan Tambun terdiri atas 8 desa.
 - b. Kecamatan Setu terdiri atas 9 desa.
 - c. Kecamatan Cibitung terdiri atas 7 desa.
3. Kewedanaan Cikarang, meliputi;
 - a. Kecamatan Cikarang terdiri atas 7 desa.
 - b. Kecamatan Lemahabang terdiri atas 8 desa.
 - c. Kecamatan Cibarusa terdiri atas 11 desa.
4. Kewedanaan Serengseng,
 - a. Kecamatan Sukatani terdiri atas 9 desa.
 - b. Kecamatan Pebayuran terdiri atas 6 desa.
 - c. Kecamatan Cabangbungin terdiri atas 5 desa.

Dengan demikian, maka daerah Kabupaten Bekasi menurut wilayah administrasi pemerintahan meliputi 4 kewedanaan dengan 13 kecamatan yang terdiri atas 95 desa. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan ini terabadikan dalam Lambang Daerah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12/P.D./62 pada tanggal 20 Agustus 1962 dengan sesanti. "SWATANTRA WIBAWA MUKTI" yang diartikan

sebagai “Daerah yang Mengurus Rumah Tangga Sendiri, Berpengaruh dan Jaya-Makmur”.

Pada tanggal 19 Oktober 1945 terjadi insiden Kali Bekasi dan tanggal 23 November 1945 dimulainya peristiwa Bekasi lautan api yaitu terjadi pertempuran antara masyarakat Bekasi dengan tentara sekutu.

Situasi tahun 1949 masih diwarnai pertempuran dan diplomatis, Bekasi masih merupakan kawedanaan, bagian dari Kabupaten Jatinegara. Kemudian awal tahun 1950 para tokoh masyarakat Bekasi membentuk Panitia Amanat Rakyat Bekasi, dan pada tanggal 17 Januari 1950 Panitia Amanat Rakyat mengadakan rapat umum dengan semua masyarakat Bekasi. Dari hasil rapat umum itu menghasilkan beberapa tuntutan, rakyat Bekasi meminta kepada pemerintah agar Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi. Setelah tiga kali pembicaraan antara bulan Februari sampai Juni 1950 akhirnya Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri RIS menyetujui pembentukan Kabupaten Bekasi.

Penggantian nama Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi tertuang dalam UU No. 14 tanggal 8 Agustus Tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten di Jabar serta memperhatikan PP No. 32 tanggal 14 Agustus 1950 tentang penetapan mulai berlakunya UU No. 12, 13, 14, dan 15 tahun 1950, dan realisasinya baru dilaksanakan tanggal 15 Agustus 1950 yang kemudian diakui sebagai lahirnya Kabupaten Bekasi/Hari Jadi Kabupaten Bekasi dengan Bupati pertama adalah R. Suhandi Umar, SH.

C. Masa Pembangunan dan Letak geografis

Sebelum dilaksanakannya, Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama (Repelita I) tahun 1969-1974 kondisi daerah Kabupaten Bekasi masih sangat memprihatinkan, kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas, sedangkan keadaan masyarakat sangat tertinggal dan miskin, lebih dari itu kondisi infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pengairan, listrik, bahkan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat minim. Dengan demikian pilihan prioritas untuk memulai pembangunan menjadi cukup sulit. Pada awal dasawarsa enam puluhan Pemerintah pusat memulai pembangunan Saluran Induk Tarum Barat sebagai bagian dari jaringan irigasi Jatiluhur. Pekerjaan tersebut diawali dengan pembuatan saluran primer, kemudian saluran-saluran sekunder dan terakhir saluran-saluran tertier. Sebagian besar dilakukan dengan pola Padat Karya, sehingga sekaligus bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat. Memasuki tahapan pembangunan lima tahun pertama, yaitu semasa kepemimpinan Bupati M. Soekat Soebandi.

Pemerintah Pusat mulai meluncurkan bantuan berturut-turut; tahun 1969 berupa Inpres Bantuan Pembangunan Desa Rp. 100.000,- per desa, tahun 1970 berupa Inpres bantuan prasarana jalan dan jembatan Rp. 50,- per kapita, tahun 1972 berupa Inpres Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan pada tahun 1973 disusul pula dengan Inpres Bantuan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Kesehatan. Pada tahun 1971 telah dibentuk pula Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

(BAPPEMKA) Bekasi dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 1/1971, yang sekarang dikenal sebagai Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bekasi.

Tahapan Pembangunan Lima Tahun Kedua dan Ketiga praktis sepenuhnya di bawah kepemimpinan Bupati H. Abdul Fatah. Pada masa itu seluruh pekerjaan jaringan Irigasi Tarum Barat telah rampung dan dapat mengairi secara teknis dan setengah teknis areal pesawahan seluas 30.000 Ha, dari luas keseluruhan 87.000 Ha. Bersamaan dengan itu dilaksanakan pula Program Bimas, Inmas, Inmum, Insus, dan pencetakan sawah yang disertai dengan pemberian kredit usaha tani. Hasilnya setiap tahun Daerah Kabupaten Bekasi mengalami surplus gabah, sehingga dapat menyumbang stock nasional dan sekaligus mendudukannya menjadi salah satu lumbung padi Jawa Barat.

Di Tahun 1974 dikembangkan pula kebijakan perencanaan Jabotabek, dan Kabupaten Bekasi terkait di dalamnya sebagai salah satu daerah penyangga dalam system Metropolitan Jabotabek dan mendapat fungsi untuk pengembangan industri dan permukiman dengan tetap mempertahankan fungsi pertanian. Dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut, investasi disektor industri dan pemukiman, baik PMA, PMDA, maupun swasta nasional menjadi luas, sehingga membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang besar bagi masyarakat. Kedua momentum pembangunan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Pimpinan Daerah H. Abdul Fatah, sehingga pendapatan daerah melonjak tajam dan seiring

dengan itu kesejahteraan masyarakat meningkat. Pada masa itu dibangun Kantor Pemerintah Daerah yang baru di Jalan A. Yani No. 1 Bekasi, dibangun pula stadion, gedung olahraga dan monument daerah yang berbentuk patung lele dan buah manggis perlambang kesejahteraan bagi masyarakat Bekasi dalam masa transisi pembangunan. Monument tersebut berada di tengah kota Bekasi yang sekarang menjadi papan iklan, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Pembangunan infrastruktur pun berlangsung amat cepat. Hasil dari berbagai kondisi tersebut saling bersinergi satu sama lain sehingga kiprah pembangunan di Kabupaten Bekasi menjadi sangat pesat. Terkenal pada saat itu Motto pembangunan yang dicanangkan Bupati H. Abdul Fatah dengan *“setitik air dan sejengkal tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat”*. Setelah selesai pengabdian dipemerintahan, beliau melanjutkan pengabdian di masyarakat dengan memimpin Yayasan Pendidikan Islam Empat Lima dan mendirikan Universitas Islam 45 (UNISMA).

Tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat dan Kelima bertepatan dengan masa kepemimpinan Bupati H. Suko Martono. Pada masa itu pembangunan disektor pertanian tetap signifikan. Namun perhatian yang lebih besar diberikan pula kepada sektor industri dan pemukiman. Disamping itu perhatian yang besar juga dilakukan terhadap sektor perpasaran, yakni dengan melakukan renovasi dan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta memfasilitasi pembangunan disektor keagamaan

ditandai secara monumental dengan pembangunan Islamic Centre dan pendirian Yayasan Nurul Iman yang sampai saat ini dikelola beliau.

Tahap Pembangunan Lima Tahun Keenam bertepatan dengan kepemimpinan Bupati H. Mochammad Djambhari. Beliau memulai kiprah pembangunannya dengan Motto "Back to Village" (Kembali kedesa) dengan mengadakan berbagai proyek-proyek percontohan disektor pertanian. Disamping itu kepada para investor perumahan dikenakan kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan sekolah dasar dan lahan tempat pemakaman umum. Pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Bekasi mendorong Kota Administratif Bekasi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi. Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 18 Desember 1996 terbentuklah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan Ibukota di Bekasi meliputi luas wilayah 21.000 Ha lebih yang terdiri atas 7 kecamatan, yakni : kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Jatiasih, Pondok gede dan Bantargebang. Bupati H. Wikanda Darmawijaya memimpin Kabupaten Bekasi menjelang dan memasuki masa reformasi.

Khususnya pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka sistem pemerintahan daerah berubah, sehingga menempatkan DPRD di luar Pemerintah Daerah, bahkan menjadi mitra yang sejajar dengan Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah diselenggarakan secara lebih otonom. Pada masa transisi seperti ini eforia

demokratisasi dan kebebasan cenderung mengemuka, namun berkat kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah semua itu dapat dilalui dengan mulus. Bahkan bersama DPRD tekad Bupati H. Wikanda Darmawijaya untuk membangun Daerah Kabupaten Bekasi yang bernuansa agamis dapat dirumuskan dengan visi “Manusia Unggul yang Agamis Berbasis Agri Bisnis dan Industri Berkelanjutan“. Wujud aplikasinya ditandai dengan, mengembangkan program Posyandu Unggul, penghapusan lahan prostitusi “Malvinas“ yang dialihkan pemanfaatannya untuk bangunan Rumah Sakit Daerah dan pembangunan Masjid, juga pemberantasan buta huruf AI-Qur’an.

Pada masa kepemimpinan Bupati H. Wikanda Darmawijaya tersebut Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi mulai dilaksanakan. Pada saat mengakhiri masa jabatannya beliau telah berhasil membangun Gedung DPRD dan bangunan induk gedung Kantor Pemerintah Daerah serta bangunan perlengkapannya berupa Masjid di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat. Pembangunan gedung-gedung Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi tersebut dilanjutkan oleh Bupati berikutnya yakni Drs. H.M. Saleh Manaf. Bahkan pada masa beliau gedung-gedung tersebut mulai difungsikan, sehingga praktis pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi mulai dikendalikan dan pusat pemerintahan yang baru ini. Bersamaan dengan itu gedung-gedung pusat pemerintahan yang lama diserahkan kepada Pemerintah Kota Bekasi dengan imbalan sejumlah

dana yang dibayarkan secara angsuran. Pada masa pemerintahan Bupati Drs. H.M. Saleh Manaf juga terjadi pemekaran wilayah kecamatan dari 15 kecamatan menjadi 23 kecamatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2004 , tentang Pemekaran Kecamatan di Daerah Kabupaten Bekasi.

Kepemimpinan Bupati Drs. H.M. Saleh Manaf dan Wakil Bupati Drs. H. Solihin Sari hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun, sejak diberhentikannya kedua pejabat tersebut telah diangkat Drs. H. Tenny Wishramwan, M.Si sebagai Penjabat Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi. Saat ini sedang dilaksanakan berbagai persiapan dalam rangka pemilihan Kepala Desa pada 165 desa. Sementara itu dengan selesainya proses hukum yang berkaitan dengan pemberhentikan kedua pejabat tersebut telah selesai maka selanjutnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang defenitif dapat diselenggarakan.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang termasuk didalam provinsi Jawa Barat, yang terletak pada koordinat $106^{\circ} 58' 5''$ - $107^{\circ} 17' 45''$ BT dan $05^{\circ} 54' 50''$ - $06^{\circ} 29' 15''$ LS. Di sebelah Utara Kabupaten Bekasi terdapat perbatasan dengan laut Jawa yang memiliki potensi sumber daya dari bidang kelautan karena berdekatan langsung dengan pelabuhan Tanjung Priuk, di sebelah barat Kabupaten Bekasi terdapat perbatasan yang membatasi Kabupaten Bekasi dengan DKI Jakarta yang memiliki predikat sebagai kota metropolis, di sebelah bagian timur

Kabupaten Bekasi berbatasan langsung dengan Kabupaten Karawang yang memiliki predikat sebagai daerah yang memiliki sumber daya beras yang berpotensi dan di bagian sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor sebagai daerah yang memiliki predikat sebagai kota hujan.

Kabupaten Bekasi memiliki luas daerah sebesar $\pm 1.484,7 \text{ m}^2$ yang terdiri dari 23 Kecamatan dan hampir memiliki 187 Desa. Jumlah Desa di setiap Kecamatan berkisar antara 6 sampai 13 Desa. Kecamatan dengan jumlah Desa yang paling sedikit yaitu daerah Cikarang pusat yang memiliki 6 Desa, Kecamatan Bojongmangun memiliki 6 Desa, dan Kecamatan Muaragembong memiliki 6 Desa, sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah yang banyak terdapat di Kecamatan Pebayuran yang memiliki 13 Desa. Sedangkan daerah di kabupaten Bekasi yang memiliki luas wilayah yang begitu besar terdapat pada Kecamatan Muaragembong yang hampir 11% luas wilayahnya dari kabupaten Bekasi. (Lihat Tabel 1).

D. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk merupakan suatu parameter yang sering dihadapi oleh suatu daerah. Misalnya di beberapa Desa yang berada kabupaten Bekasi terjadi peningkatan di tiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dilatar belakangi oleh adanya faktor pendukung dari tingkat perkembangan didalam suatu Desa dan itu berimplikasi pada pandangan tentang Desa tersebut sebagai Desa yang memiliki daya tarik yang tinggi. Desa yang mengalami peningkatan jumlah penduduk kemungkinan beralih

fungsi menjadi daerah yang menjadi wilayah bersifat urban di sebabkan oleh banyaknya masyarakat dari daerah lain untuk menetap secara permanen atau secara nomaden.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi pada tahun 2006 hingga mencapai 736.153 jiwa yang tersebar di seluruh Desa yang berada di Kabupaten Bekasi. Kemudian pada tahun 2008 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang signifikan terjadi di Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Babelan pertumbuhan dan persebaran jumlah penduduk yang teradapat di Kabupaten Bekasi. Desa yang memiliki peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk di latarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya wilayah yang dekat dengan wilayah geografis perkotaan dan wilayah industri seperti di daerah Tambun selatan dan mata pencaharian penduduknya didominasi oleh buruh-buruh pabrik. Faktor itulah yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di beberapa Desa yang berada di Kabupaten Bekasi. Sedangkan jumlah penduduk yang terendah terjadi di beberapa Kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi, diantaranya : Bojongmangun dan Tambelang. Faktor yang melatar belakangi tidak signifikannya jumlah penduduk di daerah bagian utara disebabkan karena wilayah geografis yang tidak strategis atau daerah yang jauh dari perkotaan dan jauh dari wilayah industri serta akses jalan yang masih kurang memadai.

Kecamatan Muaragembong terdapat di pesisir pantai Cilincing. Jika di hitung jarak antara Kota Bekasi-Kecamatan Muaragembong kurang lebih

jarak yang ditempuh sekitar 73 km dengan kecepatan tempuh 60 km/detik dan mata pencaharian masyarakat Kecamatan Muaragembong mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan karena berdekatan langsung dengan pulau Jawa.

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi Pada Juli Tahun 2008

Tabel II. 1

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Awal			Jumlah Penduduk Akhir		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Tarumajaya	43.826	44.826	88.652	43.826	44.826	88.652
2	Babelan	84.757	83.967	168.724	84.757	83.967	168.724
3	Sukawangi	21.515	20.234	41.749	21.514	20.239	41.753
4	Tambelang	16.611	16.364	32.975	16.611	16.364	32.975
5	Tambun utara	50.018	48.041	98.059	50.018	48.041	98.059
6	Tambun selatan	176.981	169.645	346.626	177.203	169.861	347.064
7	Cibitung	60.523	58.005	118.528	60.668	58.136	118.804
8	Cikarang barat	82.310	79.756	162.066	82.391	79.844	162.235
9	Cikarang utara	74.457	73.430	147.887	74.454	73.429	147.883
10	Karang bahagia	32.955	33.068	66.023	32.955	33.068	66.023
11	Cikarang timur	35.321	33.912	69.233	35.347	33.942	69.289
12	Kedung waringin	26.059	24.617	50.676	26.064	24.626	50.690
13	Pebayuran	43.812	45.437	89.249	43.812	45.437	89.249
14	Sukakarya	21.076	21.154	42.230	21.076	21.154	42.230
15	Sukatani	32.324	30.856	63.180	32.328	30.863	63.191
16	Cabangbungin	23.554	23.463	47.017	23.554	23.463	47.017
17	Muaragembong	18.159	17.984	36.143	18.159	17.984	36.143
18	Setu	40.273	39.227	79.500	40.287	39.251	79.538
19	Cikarang selatan	37.352	37.388	74.740	37.612	37.475	75.087
20	Cikarang pusat	21.513	21.845	43.358	21.556	21.889	43.445
21	Serang baru	37.371	37.825	75.196	37.371	37.825	75.196
22	Cibarusah	30.829	29.720	60.549	30.848	29.770	60.618
23	Bojong mangun	11.813	11.791	23.604	11.813	11.791	23.604
jumlah		1.023.409	1.002.555	2.025.964	1.024.224	1.003.245	2.027.469

Sumber dari : <http://www.bekasikab.go.id/www/html/3tno.php>

Sama dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk merupakan suatu parameter yang dapat mengukur tingkat urbanisasi yang terjadi pada

suatu daerah atau wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bekasi pada tahun 1996 mencapai jumlah 9,47 jiwa/Ha, sedangkan pada tahun 2006 kepadatan penduduk meningkat hingga menjadi 15,52 jiwa/Ha¹.

Secara keseluruhan kepadatan penduduk terjadi di Kabupaten Bekasi, desa-desa yang merasakan dampak pada terjadinya kepadatan penduduk, diantara lain : Desa yang berada di Cikarang utara yaitu Desa Cikarang Kota dengan jumlah peningkatan penduduk mencapai 151.7 Jiwa/Ha. Sedangkan Desa yang mengalami peningkatan kepadatan penduduk terendah terjadi di Desa pantai Harapanjaya yang berada di Kecamatan Muaragembong dengan jumlah penduduk mencapai 1.16 Jiwa/Ha.

Di tiap tahunnya terjadi peningkatan pada jumlah penduduk di beberapa Desa di Kabupaten Bekasi. Pada umumnya persebaran pada peningkatan tersebut terjadi pada daerah bagian barat Kabupaten Bekasi karena faktor wilayah yang sangat strategi, sedangkan wilayah yang memiliki peningkatan pada jumlah penduduk yang terendah terjadi pada daerah bagian utara dan selatan Kabupaten Bekasi.

Secara lebih spesifik peningkatan jumlah penduduk tersebut terjadi di beberapa Desa yang berada di Kabupaten Bekasi. Khususnya dalam hal ini Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pada kepadatan penduduk yang tertinggi terjadi di beberapa desa yang berada di Kabupaten Bekasi diantaranya Kecamatan Babelan, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan

¹ Informasi di dapat dari Badan Pusat Statistik Kab. Bekasi Tahun 2007

Sukatani dan Kecamatan Tambun Utara. Daerah kecamatan ini merupakan *representative* daerah yang berada pada Kabupaten Bekasi Utara yang merupakan salah satu daerah yang menjadi kajian utama dalam pemekaran, juga sebagai daerah yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih. Selain memiliki sumber daya ekonomi yang lebih juga diantaranya akan dijadikan menjadi ibu kota Kabupaten dalam pemekaran Kabupaten Bekasi Utara.

Infrastruktur yang terbangun, Keluarga pra sejahtera dan keluarga yang tinggal di pemukiman kumuh.

Pada salah satu wilayah urban adalah tingginya persentase wilayah yang memiliki infrastruktur yang terbangun terhadap luas wilayah secara keseluruhan. Kabupaten memiliki infrastruktur yang terbangun pada tahun 2006 sekitar 36.810 Ha wilayah.

Keluarga pra sejahtera dan pemukiman kumuh merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk pada suatu desa. Parameter ini digunakan karena untuk menjelaskan adanya tingkat kemiskinan keluarga yang berbeda pada tiap desanya. Pada tahun 2006 jumlah keluarga pra sejahtera yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi pada persebaran yang terbanyak terdapat di Desa Wanasari Kecamatan Cibitung yaitu sekitar 6.932 Keluarga. Sedangkan pada tahun 2006 keluarga yang tinggal di wilayah pemukiman kumuh khususnya berada di wilayah Bekasi Utara berada pada 37 Desa, diantaranya, di Kecamatan Sukatani : Desa Sukadarma, di Kecamatan Tambelang : Desa Sukarapih dan Desa Sukarahayu, Di Kecamatan Muaragembong : Desa Pantaibahagia dan Desa

Pantaimekar, Di Kecamatan Kedungwaringin : Desa Waringinjaya, dan daerah yang lain.

Jaringan jalan Kabupaten Bekasi

Jaringan jalan merupakan salah fasilitas pendukung yang mewakili akses bagi suatu pertumbuhan maupun perkembangan pada suatu daerah. Karena fasilitas jalan juga berfungsi sebagai akses informasi bagi daerah untuk mengembangkan potensi sosial ekonomi yang ada. Jaringan jalan yang berada di Kabupaten Bekasi terdiri dari jalan Tol, jalan Arteri dan jalan lokal

Klasifikasi dan panjang jalan di Kabupaten Bekasi
Tabel II. 2

Klasifikasi Jalan	Panjang Jalan
Jalan Tol	21.584,282 m ²
Jalan Arteri	37.278,973 m ²
Jalan Lokal	1.324.959,697 m ²

Sumber : Hasil pengolahan data Kabupaten Bekasi

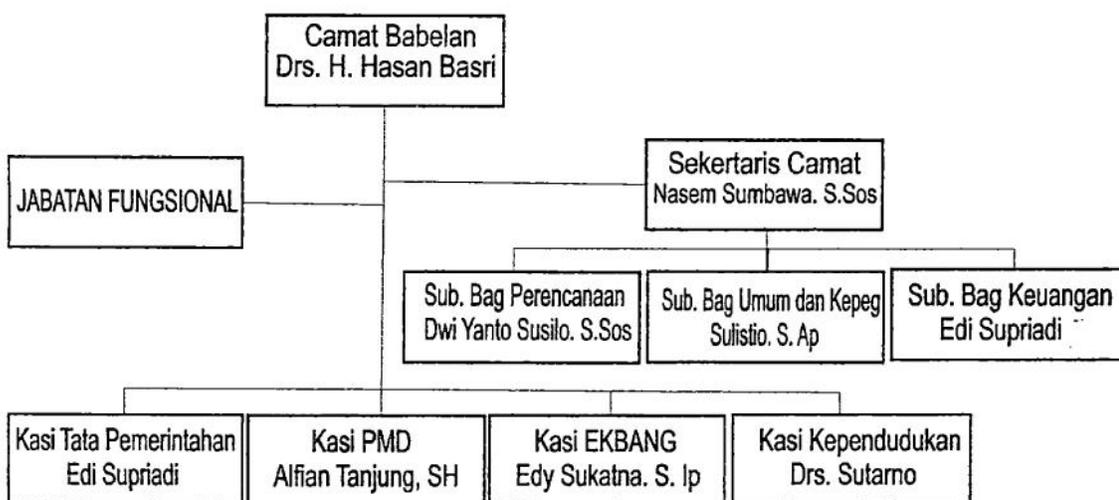
Jalan tol yang berada di Kabupaten Bekasi saat ini merupakan jalan yang menghubungkan antara provinsi DKI Jakarta dengan Cikampek. Jalan tol Cikampek di bangun pada tahun 1984 dan diselesaikan oleh pemerintahan Bekasi pada saat itu pada tahun 1989. Jalan tol ini pun melewati beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi, diantaranya : Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Utara dan Kecamatan Cikarang Barat.

Selain itu, Kabupaten Bekasi pun memiliki jalan Arteri sebagai jalur penghubung bagi kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi, diantaranya : Jl. Sultan Hasanudin, Jl. Teuku Umar, Jl. Imam Bonjol, Jl. Fatahilla, Jl. HOS Tjokroaminoto, Jl. Yos Sudarso, Jl. RE. Martadinata, Jl. Gatot Subroto, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Lemahabang-Cibarusah, Jl. Raya Cibarusah, Jl. Industri Jababeka, dan Jl. Rengas Bandung.

E. Profil Kecamatan Yang Rencananya Akan Dimekarkan

1. Kecamatan Babelan

Bagan 1
Struktur Organisasi Kecamatan Babelan



1.1 Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk yang dimiliki oleh Kecamatan Babelan pada bulan Desember 2009 mencapai 167.549 penduduk dengan persebaran penduduk terbesar berada di Desa/Kelurahan Babelan Kota mencapai 54.863 jumlah penduduk, sedangkan daerah yang terkecil pada persebarannya terdapat di Desa/Kelurahan Hurip Jaya mencapai jumlah

penduduk sekitar 4.192. Kepadatan penduduk ini berdasarkan dari sirkulasi jumlah penduduk yang termutasi (lahir, mati, pindah dan datang). Daerah kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk yang terbesar pada tingkat penduduk yang datang dan pindah pada bulan Desember berada di Desa Bahagia sekitar 190 jiwa dengan persentase 53 % dari jumlah keseluruhan penduduk yang datang, sedangkan sirkulasi penduduk yang pindah di Desa/Kelurahan dengan sirkulasi penduduk yang termutasi terkecil berada di Desa/Kelurahan yang sama dengan jumlah penduduk mencapai 63 jiwa dengan persentase 33% dari jumlah keseluruhan penduduk yang pindah di Kecamatan Babelan.

Kemudian, sirkulasi jumlah penduduk yang terkecil, yang memiliki status pendatang berada di Desa/Kelurahan Pantai Hurip sekitar 12 jiwa dengan persentase 3% dari jumlah keseluruhan penduduk yang datang, sedangkan dalam sirkulasi kependudukan yang memiliki status pindah terjadi di Desa/Kelurahan Hurip Jaya dengan jumlah penduduk 5 Jiwa dengan persentase 35 dari keseluruhan jumlah penduduk yang pindah, yang berada di Kecamatan Babelan.

Tabel II. 3
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Babelan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk Akhir Bulan Desember 2009			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Desa Babelan kota	15.462	13.395	28.857	17
2	Kelurahan Bahagia	27.195	27.670	54.865	32
3	Kelurahan Kebalen	17.941	17.257	35.198	21
4	Desan Kedung Pengawas	5.408	6.176	11.584	7
5	Desa Kedung Jaya	4.393	5.453	9.846	6
6	Desa Muara Bakti	4.865	4.578	9.443	6
7	Desa Buni Bakti	3.909	3.902	7.811	5
8	Desa Pantai Hurip	2.926	2.827	5.753	3
9	Desa Hurip Jaya	2.162	2.030	4.192	3
Jumlah		84.261	83.288	167.549	100

Laporan kependudukan Kecamatan Babelan pada akhir 2009

1.2 Fasilitas Sosial Ekonomi dan Jalan

Fasilitas ekonomi merupakan suatu fasilitas yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat di dalam suatu daerah sebagai pemenuh kebutuhan maupun sebagai pelengkap kebutuhan. Fasilitas sosial ekonomi merupakan salah satu pendukung adanya daya tarik bagi suatu wilayah tertentu. Fasilitas sosial ekonomi juga merupakan bagian yang terpenting bagi daerah untuk mengukur tingkat pembangunan yang terjadi dalam mewujudkan konsep pemerintahan sebagai fasilitator bagi kualitas maupun kuantitas pelayanan. Selain sebagai pendukung fasilitas sosial ekonomi menjadi hal yang terpenting dalam mengukur pada daerah tertentu sebagai syarat daerah yang maju dan fasilitas sosial ekonomi juga sebagai sarana yang menjadi kewajiban bagi daerah dalam bentuk kelengkapan untuk daerah meningkatkan pendapatan yang lebih maju dan terkendali. Akan tetapi tidak hanya itu, fasilitasi sosial ekonomi juga dapat menjadi tolak

ukur untuk perkembangan kebudayaan masyarakat sebagai bentuk respon terhadap kemajuan dalam suatu wilayah. Parameternya, apabila wilayah tersebut semakin banyak memiliki fasilitas sosial ekonomi, maka masyarakat atau penduduk yang berada di wilayah tersebut akan mendapatkan kemudahan dan daerah tersebut akan memiliki daya tarik bagi penduduk di daerah lain untuk datang maupun memakai fasilitas yang ada.

Tabel. II. 4
Tingkat Ekonomi Masyarakat
Kecamatan Babelan

No	Indikator	Sub indikator	Jumlah
			Tahun 2009
1	Pengangguran	Penduduk dengan usia kerja 15-56 tidak bekerja.	118.248 orang
2	Pendapatan	1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Perkebunan 4. Perternakan 5. Perikanan 6. Perdagangan 7. Industri rumah tangga	1.289 --- 1.382 1.478 798 8.873 12
3	Kelembagaan ekonomi	1. Pasar 2. Lembaga Koperasi 3. Angkutan 4. Toko	3 6 365 4.581
4	Tingkat kesejahteraan	Jumlah keluarga prasejahtera	14.093

Secara kewilayahan Babelan memiliki fasilitas sosial-ekonomi yang mendukung, karena di wilayah kecamatan Babelan memiliki luas wilayah 5.712,62 Ha dengan di wilayah kerja administratif pemerintah 7 Desa dan 2 Kelurahan dengan sarana transportasi yang dimiliki,

- a. Di bagian Selatan menghubungkan jalan antara terminal Babelan menuju arah Kota Bekasi dengan jarak tempuh \pm 14

Km dengan tingkat kepadatan yang relative padat sebagai jalur perekonomian.

- b. Di bagian Tengah/Barat menghubungkan jalan antara terminal Babelan ke perbatasan antara kota Bekasi dengan Jakarta melalui Pondok Ungu dengan jarak tempuh ± 15 Km melalui Desa Setia Mulia dan Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya.
- c. Di bagian Utara menghubungkan antara terminal Babelan ke Jakarta khususnya ke Jakarta Utara/Tanjung Priuk dengan jarak yang di tempuh ± 17 Km melalui Desa Bumi Bakti kemudian melalui Pasar Bojong Kecamatan Tarumajaya langsung ke Marunda/Cilincing.

Selain dari sarana transportasi yang dimiliki sebagai sarana untuk penunjang sosial-ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya, juga kecamatan Babelan memiliki sarana ekonomi sebagai lahan produktif yang dapat menjadi sarana untuk masyarakat, diantaranya, Lahan Pertanian, sarana jaringan telekomunikasi dan air bersih melalui PDAM.

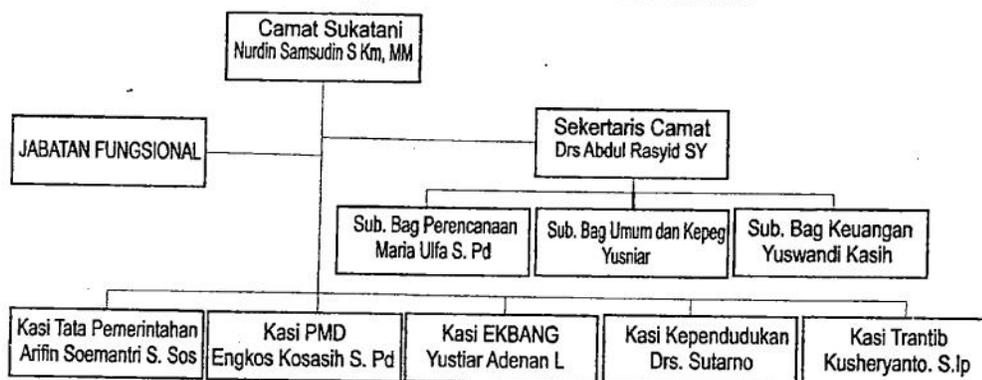
Tabel II. 5
Sarana Pertanian pada wilayah Kecamatan Babelan

Desa/Kelurahan	Luas Lahan Persawahan	Luas Desa
Bumi Bakti	± 740 Ha	± 613 Ha
Kedung Pengawas	± 510 Ha	± 584 Ha
Muara Bakti	± 360 Ha	$\pm 65,4$ Ha
Pantai Hurip	± 450 Ha	± 8 Ha

Selain lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Babelan juga memiliki Sumber Migas dan pertambangan sebagai suatu sarana bagi pelengkap sosial ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Babelan. Sumber migas berada di Desa Bumi Bakti dan Kedung Jaya yang di kelola langsung oleh Pertamina. Selain sumber migas yang dimiliki oleh Kecamatan Babelan juga rencananya di Desa Bumi Bakti akan dibangun jalan Tol yang menghubungkan antara Tanjung Priok–Cikarang. Dan lahan pertambangan yang berada di Desa Hurip jaya dengan luas pertambangan mencapai \pm 750 Ha.

2. Kecamatan Sukatani

Bagan 2
Struktur Organisasi Kecamatan Sukatani



2.1 Kepadatan penduduk

Sukatani merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang baik. Sumber ekonominya di peroleh dari hasil pertanian, mayoritas masyarakat sukatani bermata pencaharian sebagai buruh tani. Menurut pak kosasi (Kasi PMD) bahwa mayoritas masyarakat berpenghasilan dari pertanian.

Jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Sukatani pada bulan Desember Tahun 2009 mencapai jumlah penduduk sekitar 65.658, dengan persebaran tingkat penduduk yang tinggi terjadi di desa/kelurahan Sukamulya yang memiliki jumlah penduduk mencapai 5.687 jiwa, sedangkan daerah yang rendah pada tingkat kepadatan penduduknya terjadi di desa/kelurahan Sukahurip dengan tingkat sirkulasi penduduk mencapai 3.064 jiwa. Sirkulasi jumlah penduduk yang terjadi dikarenakan adanya perpindahan penduduk maupun tingkat kematian yang terjadi di Kecamatan Sukatani.

Dalam sirkulasi jumlah penduduk yang berada di Kecamatan sukatani persentasi kepadatan penduduk yang besar berada di desa/kelurahan Sukamulya dengan persentase mencapai 23%, sedangkan daerah yang memiliki tingkat terendah dalam sirkulasi jumlah kepadatan penduduk yang rendah berada di desa/kelurahan Sukaasih dengan persentase jumlah penduduk mencapai 9%.

Tabel II. 6
Jumlah penduduk Kecamatan Sukatani

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk Awal Tahun 2010			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Sukamulya	7.440	7.429	14.869	23
2	Sukadarma	4.357	4.497	8.854	13
3	Sukamanah	5.693	4.952	10.645	16
4	Sukarukun	5.575	4.959	10.534	16
5	Sukahurip	3.067	3.352	6.419	10
6	Sukaasih	3.082	2.716	5.798	9
7	Banjarsari	4.236	4.225	8.461	13
Jumlah		33.450	32.130	65.580	100

Laporan kependudukan kecamatan Sukatani pada Januari 2010

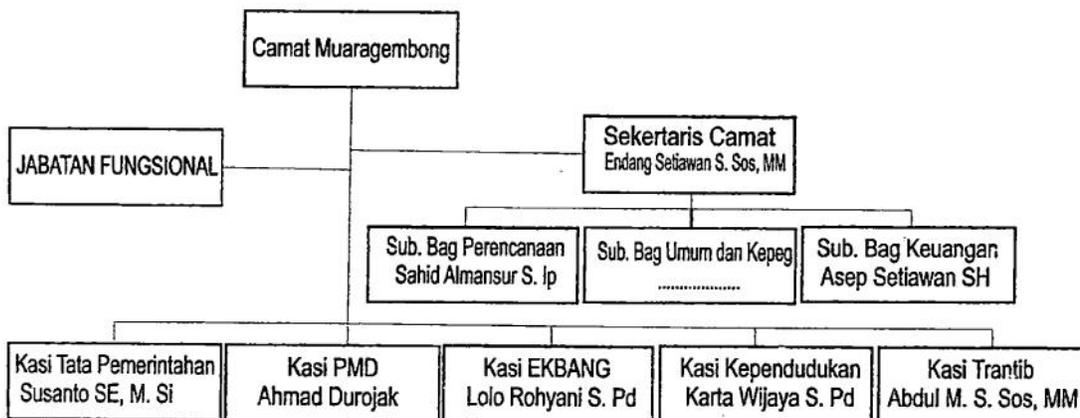
Secara kewilayahan Sukatani merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi dalam bidang pertanian. Menurut Kosasi, bahwa mayoritas masyarakat yang berada di daerah Sukatani merupakan buruh tani bukan petani. Menuurutnya, buruh tani merupakan pekerjaan yang secara tidak langsung tidak memiliki lahan persawahan akan tetapi hanya sebagai penggarap dari lahan-lahan persawahan yang telah ada.

Dari hasil observasi bahwa masyarakat yang memiliki predikat sebagai mahasiswa sangat minim dan mayoritas masyarakatnya hanya menempuh pendidikan hingga sekolah menengah utama saja. Setelah selesai menempuh pendidikan sekolah menengah umum maka secara langsung masyarakatnya melanjutkan untuk tidak menyekolahkan anaknya hingga tingkat yang lebih tinggi akan tetapi melanjutkannya menjadi pekerja buruh pabrik. Karena Kecamatan Sukatani merupakan daerah yang

secara langsung berdekatan dengan daerah pabrik. Untuk itu masih minimnya kualitas sumber daya yang dimiliki oleh daerah Sukatani menjadikan Sukatani dapat dianggap sebagai salah satu daerah yang masih tertinggal dari segi pendidikan.

3. Kecamatan Muaragembong

Bagan 3
Struktur organisasi Kecamatan Muaragembong



3.1 Kepadatan penduduk

Sedangkan jumlah penduduk di kecamatan Muaragembong berbeda dengan yang lainnya dengan hampir di tiap desa/kelurahan memiliki jumlah rata-rata yang sama. Kecamatan Muaragembong merupakan daerah yang berada berdekatan langsung dengan laut, secara kewilayahan wilayah Muaragembong merupakan daerah yang rawan bencana banjir karena berdekatan langsung dengan muara sungai. Desa yang dimiliki oleh kecamatan Muaragembong sekitar 6 (enam) desa. Menurut Kasi (Kepala Seksi Kependudukan) kecamatan Muaragembong data kependudukan pada tahun 2009 tidak berbeda jauh dengan data statistik yang berada pada tahun 2007 dengan jumlah penduduk 37.787 jiwa. Untuk data yang diperoleh,

yang menjadi representasi jumlah penduduk yang dimiliki oleh Kecamatan Muaragembong, dengan jumlah,

Tabel II. 7
Data Jumlah Penduduk
Kecamatan Muaragembong pada Tahun 2008

No	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk pada Tahun 2008			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Pantai Harapan Jaya	3.386	3.126	6.512	17
2	Pantai Mekar	3.516	3.236	6.752	18
3	Pantai Sederhana	1.999	1.889	3.898	10
4	Pantai Bakti	3.546	3.189	6.735	18
5	Pantai Bahagia	3.702	3.399	7.101	19
6	Jayasakti	3.425	3.364	6.789	18
Jumlah		19.574	18.213	37.787	100

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, 2008

Kecamatan Muaragembong yang merupakan wilayah di pesisir laut pulau Jawa, secara kewilayahan kecamatan Muaragembong juga berada di dekat dengan bantaran sungai. Menurut Ahmad Durojak (Kasi PMD) masyarakat kecamatan Muaragembong mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai faktor pendukung ekonominya tergantung dari hasil perikanan dengan mata pencaharian masyarakat sekitar yaitu sebagai nelayan. Karena potensi yang dimiliki oleh daerah Muaragembong yang secara langsung berdekatan dengan pesisir pulau Jawa dan dilewati oleh hulu dari waduk Jatiluruh yang setiap saat akan meluap. Maka pantas jika daerah Muaragembong sangat rawan terhadap bencana banjir. Menurutnya, jika aliran sungai yang menjaluri daerah Muaragembong memiliki indikasi

meluap maka masyarakat yang tinggal di sekitaran bantaran sungai mulai siaga untuk mencegah terjadinya banjir, seperti yang terjadi pada waktu pertengahan bulan Maret ini. terjadinya banjir yang diakibatkan oleh adanya air kiriman dari waduk Jatiluruh, mengakibatkan sebagian daerah di Kecamatan Muaragembong tergenang hingga dengan ketinggian banjir mencapai lutu orang dewasa.

Dari tingkat pendidikan masyarakatnya memiliki predikat sebagai mahasiswa sangat minim dan mayoritas masyarakatnya hanya menempuh pendidikan hingga sekolah menengah utama saja bahkan tidak sedikit yang menempuh pendidikan hingga sekolah menengah pertama². Setelah selesai menempuh pendidikan sekolah menengah umum maka secara langsung masyarakatnya melanjutkan untuk tidak menyekolahkan anaknya hingga tingkat yang lebih tinggi akan tetapi melanjutkannya menjadi pekerja buruh pabrik, petani maupun peternak ikan Bandeng atau nelayan. Karena Kecamatan Muaragembong merupakan daerah yang secara langsung berdekatan dengan daerah yang memiliki potensi perikanan. Untuk itu, masih minimnya kualitas sumber daya yang dimiliki oleh daerah Muaragembong yang menjadikan daerah tersebut dapat dianggap sebagai salah satu daerah yang masih terbatas dari tingkat pendidikan maupun dari akses pelayanan publiknya.

² Hasil wawancara dengan Kasi PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kecamatan Muaragembong di Kantor Kecamatan Muaragembong.